

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pusat Data Statistik Pendidikan tahun 2017/2018 menunjukkan bahwa capaian Angka Partisipasi Murni (APM) nasional tingkat SD/SMP/SMA/ sederajat masih dinyatakan kurang optimal yaitu untuk SD/ sederajat sebesar 80,93 persen, SMP/ sederajat sebesar 57,68 persen, sedang untuk SM/ Sederajat sebesar 55,14 persen. Sedangkan rata-rata nasional angka anak putus sekolah Menurut BPS, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) umur 7-12 tahun dari 97,83 (tahun 2008) menjadi 99,08 (tahun 2017), dan APS umur 13-15 tahun dari 84,41 (tahun 2008) menjadi 94,98 (tahun 2017). Artinya mayoritas penduduk Indonesia pada umur 7-15 tahun sedang mengenyam pendidikan/bersekolah. Sedangkan APS umur 16-18 tahun di Indonesia telah mencapai angka 71,20 di tahun 2017 Sekitar 29 dari 100 anak umur 16-18 tahun tidak bersekolah. Bisa juga dimaknai dengan masih tingginya anak putus sekolah pada kelompok umur tersebut yang seharusnya mereka sedang bersekolah pada pendidikan menengah atas. Masalahnya berlanjut pada lambatnya peningkatan APS umur tersebut dalam beberapa tahun terakhir. (Kemendikbud, 2017)

Menurut BPS penyebab utama dari anak putus sekolah adalah karena masalah ekonomi dan kurang minatnya anak untuk sekolah. Terkait dengan kondisi tersebut anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu memiliki angka putus sekolah empat kali lebih besar dari pada mereka yang berasal dari keluarga berkecukupan (Kemensos, 2019)

Kondisi anak putus sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan tantangan dalam arah pembangunan pendidikan saat ini, yaitu meliputi 1) bagaimana mempercepat proses peningkatan taraf pendidikan seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, terutama bagi anak dari keluarga yang tidak mampu (Bappenas, 2014); 2) bagaimana upaya meningkatkan kinerja pendidikan yang mencakup (a) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (c) penataan tata kelola,

akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan pendidikan (Suryana, 2017). Secara umum tantangan tersebut berhubungan erat dengan kuantitas dan kualitas pendidikan masa depan.

Provinsi Jawa Barat secara kuantitas merupakan salah satu provinsi yang terbanyak anak usia sekolah dasar dan menengah, namun masih belum optimal dalam memenuhi standar pendidikan yang berkualitas. Adapun capaian APM Provinsi Jawa Barat untuk jenjang SD/ sederajat adalah 83,8 persen, SMP/ sederajat 56, 75 persen dan untuk jenjang SMA/ Sederajat sebesar 55, 66 persen. (Kemdikbud, 2017). Hal ini terjadi karena salah satu penyebabnya yaitu angka kemiskinan yang ada di kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat masih tergolong tinggi, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Indramayu penyebab anak putus sekolah adalah sebagian besar karena faktor ekonomi.

Pendidikan adalah merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak didik, agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Slameto, 2010).

Pada tahun 2018 angka melanjutkan sekolah siswa tingkat menengah pertama (SMP) di kabupaten Indramayu belum mencapai angka 100 persen. Sebagai gambaran di kabupaten Indramayu jumlah siswa SMP ada sekitar 61.480 siswa. Jumlah tersebut terdiri atas 20.422 siswa kelas VII, 20.800 siswa kelas VIII dan 20.178 siswa kelas IX. Jika perhitungan perkiraan kasar angka melanjutkannya sebesar 96,5 persen maka ada sekita 700 siswa SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi penyebab dari belum semua siswa SMP di kabupaten Indramayu untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA) salah satunya adalah faktor ekonomu. (Republika, 2/1/2018)

Lebih jauh menurut Tritmansyah (1998) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sehingga banyak anak usia sekolah tidak naik kelas yang akhirnya memilih untuk tidak lanjut lagi memilih untuk putus sekolah, sebenarnya sangat kompleks. Secara garis besar ada 3 faktor utama yang menyebabkan prestasi belajar anak di sekolah tidak maksimal adalah sebagai berikut:

1. Keadaan anak itu sendiri yang memang senang bekerja dari pada belajar, bagi anak-anak yang senang bekerja ini karena mereka sudah tahu bagaimana caranya kalau mendapat uang sendiri, sehingga mereka menganggap bahwa dengan adanya uang tersebut mereka dapat melakukan apa saja demi memenuhi keinginannya.
2. Masalah ekonomi, dimana anak-anak disuruh bekerja membantu orang tuanya untuk mencari uang demi tambahan penghasilan dan demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
3. Masalah kecerobohan orang tua dalam hal pengawasan, sehingga sering dijumpai orang tua dan anak sedang asik menonton TV sampai larut malam.

Walaupun disadari bahwa ketiga faktor diatas bukanlah satu-satunya faktor penyebab banyaknya anak putus sekolah, namun faktor kemiskinan dalam banyak hal dipandang sebagai kondisi yang sifatnya sangat structural, yang artinya bahwa anak-anak dari keluarga yang secara kenyataan memiliki ekonomi relatif kurang/ keluarga miskin. Hasil penelitian lainnya di Yogyakarta, menunjukkan sebagai berikut. (1) Faktor penyebab siswa putus sekolah didominasi oleh faktor internal siswa yaitu: siswa malas untuk melanjutkan sekolah, kemampuan akademis yang lemah, dan keadaan ekonomi orang tua yang lemah. (2) Tindakan yang dilakukan orang tua berupa tindakan preventif dan kuratif. Tindakan preventif dengan memberikan motivasi, sedangkan tindakan kuratif dengan menyuruh siswa untuk Kejar Paket A (3) Tindakan yang dilakukan sekolah berupa tindakan preventif dan kuratif. Tindakan preventif dengan memberikan motivasi, sedangkan tindakan kuratif dengan melakukan kunjungan ke rumah siswa. ( Itsnaini, 2015)

Menurut data BPS tahun 2017 yang mengacu pada pendataan tahun 2014, angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu termasuk masih tinggi yaitu mencapai 13,67 persen. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia juga tergolong masih rendah yaitu sebesar 65,58 persen. Ditambah juga dengan mata pencaharian dari penduduk di kabupaten Indramayu heterogen, diantaranya menjadi petani, nelayan, pedagang, kuli bangunan dan lainnya.

Kemiskinan memiliki konsep yang beragam. World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan/ daya beli, yaitu US \$1 atau US \$2 per kapita per hari. Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan (poverty line). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang yaitu 21,00 kalori per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non-makan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi: papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasarinya. Menurut BLS, seseorang/ individu yang pengeluarannya lebih rendah dari Garis Kemiskinan maka seseorang/individu tersebut dikatakan miskin. Sedangkan kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penunahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menuntaskan wajib belajar dua belas tahun, salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah digulirkan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2007. PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak dari keluarga miskin (Kemensos, 2016). Salah satu tujuan PKH adalah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak dari keluarga

miskin, agar mereka dapat mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun dan diharapkan dapat melanjutkan pendidikan sampai dua belas tahun.

Dalam pelaksanaannya PKH dilengkapi dengan program pendampingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan oleh para pendamping. Oleh karena itu peran pendamping PKH sangat penting dalam melakukan pendampingan sehingga tujuan akhir dari PKH ini dapat tercapai yaitu perubahan perilaku dan sikap KPM, terhadap pentingnya pendidikan anak-anak mereka (Habibullah, 2011 & Abelsohn, 2011). Mengingat perannya yang cukup strategis dalam mensukseskan pelaksanaan PKH, maka sebelum menjalankan tugasnya para pendamping PKH diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis. Sehingga para pendamping memiliki kompetensi yang jelas, pribadi yang berkualitas, dan tertib administrasi. Hal ini penting, untuk menjadi bekal dalam menjalankan tugasnya, khususnya tugas pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga miskin yang menjadi sasaran dari program keluarga harapan.

Pendampingan ini sangat penting dikarenakan peserta PKH merupakan keluarga sangat miskin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka, kemudian untuk merubah perilaku keluarga agar aktif berpartisipasi dan peduli terhadap pendidikan anak mereka, dan juga untuk memastikan peserta PKH melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan program yang telah ditetapkan (Kemensos, 2016). Mengingat pendampingan program keluarga harapan ini cukup strategis dalam mensukseskan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, maka program pendampingan ini perlu dikelola secara profesional agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Manajemen sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan, karena sebuah program jika tidak dikelola dengan baik maka hasilnya pun kemungkinan besar tidak akan tercapai sesuai harapan.

Peran manajemen pendampingan program keluarga harapan sangat strategis di bidang pendidikan, yaitu dapat meningkatkan angka partisipasi anak sekolah dari keluarga tidak mampu, oleh karena itu manajemen

pendampingan harus dilakukan secara profesional, sehingga dampak dari bantuan PKH ini menjadi lebih terukur dalam capaian wajib belajar dua belas tahun. Namun, pelaksanaan di lapangan manajemen pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun masih belum terstruktur dengan baik, Dinas Sosial tidak menjalankan fungsi perencanaan melainkan hanya menunggu instruksi dari pusat, fungsi koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan juga masih belum dilakukan secara intensif, dan fungsi pengawasan serta evaluasi masih kurang optimal dilaksanakan, yaitu hanya mengandalkan dari hasil laporan bulanan para pendamping saja, sementara monitoring langsung ke lapangan masih jarang dilakukan. Padahal fungsi-fungsi itu semua merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam setiap proses manajemen.

Manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi, yang sering dikenal dengan istilah POAC yaitu *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (Terry, 2005). Sedangkan pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan (Suharto, 2010). Dengan demikian, manajemen pendampingan adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendampingan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mewujudkan wajib belajar dua belas tahun secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, manajemen pendampingan program keluarga harapan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi anak dari keluarga miskin untuk mendorong mereka dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun secara efektif dan efisien, sehingga peran manajemen pendampingan program keluarga harapan sangat dibutuhkan dalam mengelola program ini, jika pendampingan program ini dikelola dengan baik, maka akan tercapainya target wajib belajar dua belas tahun sesuai dengan harapan. Namun, jika manajemen pendampingan ini tidak dikelola dengan baik maka kemungkinan besar hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hasil penelitian Brauw & Hoddinott, Schultz, dan Garcia & Saavedra menyatakan bahwa bantuan tunai bersyarat telah menjadi alat populer untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh negara berkembang yang memiliki dampak positif dalam bidang pendidikan, yaitu dapat meningkatkan capaian pendidikan bagi keluarga miskin, dan dapat meningkatkan angka partisipasi anak sekolah (Brauw & Hoddinot, 2011; Schultz, 2004; Garcia & Saavedra, 2017). Bantuan tunai bersyarat ini juga dapat meningkatkan partisipasi murni Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan tunai bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak yang positif dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun.

Kemudian hasil penelitian Zuhara Argawinata juga menunjukkan bahwa diperlukannya manajemen pendampingan untuk meningkatkan hasil atau kompetensi tertentu dalam sebuah program (Zuhara Argawinata, 2016). Oleh karena itu manajemen pendampingan program keluarga harapan ini sangat diperlukan untuk mewujudkan wajib belajar dua belas tahun. Adapun penyebab mengapa pencapaian wajib belajar masih belum optimal, hal tersebut menurut penelitian Ulfatin, Mukhadis, & Imron disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor rendahnya ekonomi orang tua, geografis-demografis, dan sosial budaya (Ulfatin, Mukhadis, & Imron, 2010). Sedangkan permasalahan pengembangan pendidikan pada daerah perdesaan menurut penelitian Saifullah umumnya disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik dan sosial yang tidak kondusif (Saifullah, 2016).

Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar, yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan menengah kejuruan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:12). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 dalam (Rohman, 2009:100) tentang pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah pendidikan dasar. Bentuk satuan pendidikan yang terdiri atas:sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah keagamaan, sekolah menengah kedinasan, dan sekolah menengah luar biasa.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2013:17) Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan dapat dijadikan cermin tingkat pendapatannya per kapita sebulan. Penggunaan data pengeluaran ini disebabkan oleh sulit dan kurang akuratnya data pendapatan. Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Pengeluaran makanan

Pengeluaran untuk makanan terdiri dari : (a) padi-padian, (b) umbi-umbian, (c) ikan/udang/cumi/kerang, (d) daging, (e) telur & susu, (f) sayur-sayuran, (g) kacang-kacangan, (h) buah-buahan, (i) minyak & lemak, (j) bahan minuman, (k) bumbu-bumbuan, (l) konsumsi lainnya, (m) makanan & minuman jadi, (n) tembakau dan sirih

2. Pengeluaran non makanan

Semakin tinggi pendapatan, maka relatif semakin tinggi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan non makanan. Hal ini terjadi pada masyarakat modern yang kebutuhan sekunder bahkan tersier sudah mulai terpenuhi. Pengeluaran non makanan terdiri dari: (a) perumahan & fasilitas rumah tangga, (b) aneka barang dan jasa, (c) biaya pendidikan, (d) biaya kesehatan, (d) pakaian, alas kaki dan tutup kepala, (e) pajak dan asuransi, (f) keperluan pesta dan upacara perkawinan. Tingkat pendapatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendapatan bersih orang tua (Ayah dan Ibu) dari hasil mereka bekerja baik dari penghasilan pokok maupun sampingan dikurangi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran untuk kebutuhan makan dan non makan.

Hal ini sesuai dengan penelitiannya Sugianto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah adalah karena faktor ekonomi keluarga tidak mampu, rendahnya dukungan orang tua, dan faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi anak putus sekolah (Sugianto, 2017). Kemudian hasil penelitian Dewi, Zukhri, & Dunia juga menunjukkan bahwa ada enam faktor penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar, yaitu (1) faktor ekonomi, (2) faktor perhatian orang tua, (3) fasilitas pembelajaran, (4) minat anak untuk



sekolah, (5) budaya, dan (6) faktor lokasi sekolah. Faktor perhatian orang tua menjadi faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab anak putus sekolah pada usia pendidikan dasar (Dewi, Zukhri, & Dunia, 2014). Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Ulfatin mengenai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, ditemukan bahwa penyebabnya antara lain: (1) masyarakat memiliki ekonomi yang lemah, (2) sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, (3) kurangnya sarana pendidikan, (4) rendahnya kualitas dan dedikasi guru, (5) letak geografis yang sulit dijangkau, (6) keterbatasan informasi, dan (7) persepsi masyarakat yang menganggap kurang penting pendidikan bagi dirinya sendiri (Ulfatin N. , 2003).

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan manajemen pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu, yang akan dituangkan dalam sebuah tesis, yang berjudul *“Manajemen Pendampingan Program Keluarga Harapan dalam Mewujudkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Indramayu”*.

## **a. Rumusan Masalah Penelitian**

### **i. Fokus Penelitian**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mengikuti wajib belajar dua belas tahun. Pelaksanaan PKH ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran pendamping sebagai pelaksana PKH yang bertugas di tingkat kecamatan, yang berusaha untuk menjalankan fungsi manajemen dalam proses pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, peran pendamping dalam menjalankan fungsi manajemen ini sangat penting untuk melaksanakan pendampingan Program Keluarga Harapan di tingkat paling bawah yaitu kecamatan.

Manajemen pendampingan menjadi salah satu indikator yang dapat menentukan keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi anak dari keluarga miskin. Manajemen pendampingan dapat dilihat dari sejauhmana pendamping dapat merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang menggunakan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Adapun salah satu tujuan program keluarga harapan adalah untuk mewujudkan penuntasan wajib belajar dua belas tahun. Manajemen pendampingan yang belum optimal akan berdampak kepada partisipasi pendidikan anak dari KPM, sehingga manajemen pendampingan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu penuntasan wajib belajar dua belas tahun.

Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan manajemen pendampingan Program Keluarga Harapan yang telah dilaksanakan pendamping dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan? Apabila fungsi manajemen pendampingan ini dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan tujuan penuntasan wajib belajar dua belas tahun dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan suatu penilaian atau evaluasi manajemen pendampingan PKH dalam upaya mewujudkan wajib belajar sembilan tahun bagi anak peserta PKH, apakah pelaksanaan fungsi manajemen tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum optimal.

Dari permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini diarahkan pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persiapan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun.
2. Pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun.
3. Pengawasan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun

4. Dampak pendampingan keluarga harapan yang telah tercapai.
5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan wajib belajar 12 tahun dan upaya peningkatan kinerja pendampingan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun.

## ii. **Pertanyaan Penelitian**

Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Bagaimanakah Pelaksanaan Manajemen Pendampingan Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Indramayu?”*. Secara khusus, rumusan pertanyaan penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persiapan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimanakah pengawasan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu?
4. Bagaimanakah dampak pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping dalam mewujudkan wajib belajar dua belas di Kabupaten Indramayu?
5. Faktor-Faktor apa yang dapat mempengaruhi keberhasilan wajib belajar 12 tahun dan bagaimanakah upaya peningkatan kinerja pendampingan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu?

## b. **Tujuan penelitian**

- i. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai manajemen pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu

ii. Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran tentang:

1. Bagaimana persiapan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu
2. Bagaimana pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu
3. Bagaimana pengawasan pendampingan program keluarga harapan untuk mewujudkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu
4. Bagaimana dampak pendamping yang telah dilaksanakan oleh pendamping dalam mewujudkan wajib belajar dua belas di Kabupaten Indramayu
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi wajib belajar 12 tahun dan bagaimana upaya peningkatan kinerja pendampingan dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu

**c. Manfaat Penelitian**

i. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan Administrasi Pendidikan yang berkaitan dengan manajemen pelatihan, ekonomi dan pembiayaan pendidikan, dan manajemen sumber daya manusia khususnya yang mencakup manajemen pendampingan dalam mewujudkan partisipasi keluarga miskin untuk mengikuti wajib belajar dua belas tahun.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya manajemen pendampingan program keluarga harapan untuk meningkatkan partisipasi keluarga miskin dalam mewujudkan wajib belajar dua belas tahun.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian dan pengembangan terkait dengan manajemen pendampingan program keluarga harapan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dua belas tahun.

i. **Manfaat Praktis**

2. Dari aspek praktik, diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif sudut pandang atau solusi untuk memecahkan masalah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dua belas tahun di Kabupaten Indramayu.
3. Dari aspek kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan mengenai manajemen pendampingan program keluarga harapan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dua belas tahun.
4. Bagi Dinas Sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka merancang pola manajemen pendampingan program keluarga harapan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan partisipasi pendidikan keluarga miskin di Kabupaten Indramayu.

**b. Struktur Penulisan Tesis**

Sistematika penulisan tesis penelitian ini disesuaikan dengan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6411/UN40/HK/2016 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2016 (Universitas Pendidikan Indonesia, 2016). Tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan tesis.

Bab II menjelaskan tentang kajian pustaka, yang mencakup konsep manajemen, konsep program, konsep pendampingan, konsep pendidikan, kebijakan wajib belajar, teori motivasi, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian, yang mencakup desain penelitian, sumber data dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, proses pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data penelitian dan kisi-kisi instrumen penelitian.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup gambaran profil program keluarga harapan di Kabupaten Indramayu, gambaran tentang persiapan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, kendala pendampingan, hasil pendampingan, dan upaya peningkatan kinerja pendampingan.

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dan implikasi serta rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab hasil penelitian dan pembahasan.